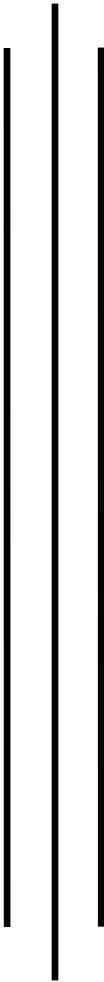


LAMPIRAN XXVII : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 32 TAHUN 2026
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2027

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERAPDU SATU PINTU TAHUN 2027



RENJA 2027



**DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM**

🌐 dpmptsp.batam.go.id

📷 [dpmptspbatam](https://www.instagram.com/dpmptspbatam)

✉ dpmptsp@batam.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam TA. 2027 dapat disusun sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah baik rencana tahunan RKPD maupun dokumen rencana jangka menengah lima tahunan (RPJMD) dan jangka panjang (RPJPD).

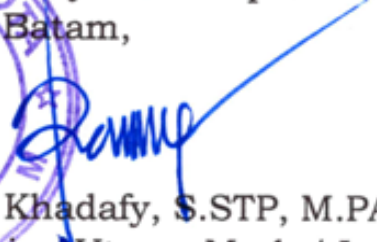
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Batam Tahun 2027 disusun mengacu dan konsisten dengan prioritas, tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah sebagaimana dalam rancangan Renstra DPMPTSP Kota Batam periode 2025-2029. Tatkala penting yang menjadi fokus penyusunannya agar selaras dengan tugas fungsi Dinas serta program prioritas Kepala Daerah terhadap pembangunan daerah Kota Batam.

Dalam dokumen perencanaan, Renja PD merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Dinas untuk dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya dan melaporkan realisasi capaian kinerja pada akhir tahun pelaksanaannya demi tercapainya tujuan dan sasaran organisasi.

Batam, 21 Juli 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Batam,




Reza Khadafy, S.STP, M.PA
Pembina Utama Muda/ Ivc
NIP.19800619 199912 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR TABELiii

DAFTAR GAMBARiv

BAB I PENDAHULUAN 1

 I.1 Latar Belakang..... 1

 I.2 Landasan Hukum 4

 I.3 Maksud dan Tujuan 5

 I.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6

 2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU dan IKK Tahun 2025.....6

 2.2 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-20258

 2.3 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis8

 2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah8

 2.3.2 Isu Strategis9

 2.3.3 Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 202510

 2.3.4 Kondisi Lingkungan Dinamis20

 2.4 Telaah Pokok Pikiran DPRD20

 2.5 Inovasi Peningkatan Pelayanan Publik20

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 22

 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 22

 3.2. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 22

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 24

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 42

BAB VI PENUTUP 43

 6.1 Catatan Penting 43

 6.2 Kaidah Pelaksanaan 43

 6.3 Rencana Tindak Lanjut 45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP Kota Batam	7
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025	11
Tabel 3.1	Target Tujuan dan Sasarann DPMPTSP Kota Batam Tahun 2027	22
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027	26
Tabel 5.1	Kinerja IKU dan IKK Tahun 2025 dan Target Tahun 2027	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Rencana Kerja 2

Gambar 1.3 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya 3

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-Undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah.

1.1.1 Gambaran Kondisi Daerah

Kota Batam merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan industri. Selain itu Kota Batam memiliki karakteristik sebagai kawasan strategis nasional yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga serta berkembang sebagai pusat industri, perdagangan, jasa, investasi, logistik dan pariwisata.

Sesuai dengan salah satu visi Kota Batam dalam dokumen RPJMD tahun 2025-2029 yaitu “Pusat Investasi dan Pariwisata Terdepan”. Maka untuk perwujudan Kota Batam sebagai pusat investasi adalah investasi yang masuk Kota Batam diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat, dengan begitu hal ini dapat mengatasi angka pengangguran. Artinya, dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah maka kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih baik.

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat membuka peluang investasi secara positif bagi upaya perbaikan atas kelemahan/kekurangan pembangunan di daerah. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin dinamis di daerah maka diperlukan upaya pembinaan, pengembangan dan inovasi secara lebih terarah dan terpadu dan peningkatan kemudahan investasi sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan pembangunan Kota Batam.

1.1.2 Definisi Renja

Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-Undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dalam kurun waktu 5 (lima) sebagaimana tertuang di dokumen perencanaan Rencana

Strategis. Renja DPMPTSP Kota Batam bertujuan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renja disusun sesuai dengan Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017, dan Pasal 5 dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, yang disertai indikator kinerja dan pendanaan, berpedoman dengan Renstra PD dan RKPD sesuai dengan tugas fungsi DPMPTSP Kota Batam berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Batam.

Sesuai Peraturan Daerah tersebut kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Batam.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sesuai dengan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 28 tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan uraian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

GAMBAR 1.1 Tahap Penyusunan Renja

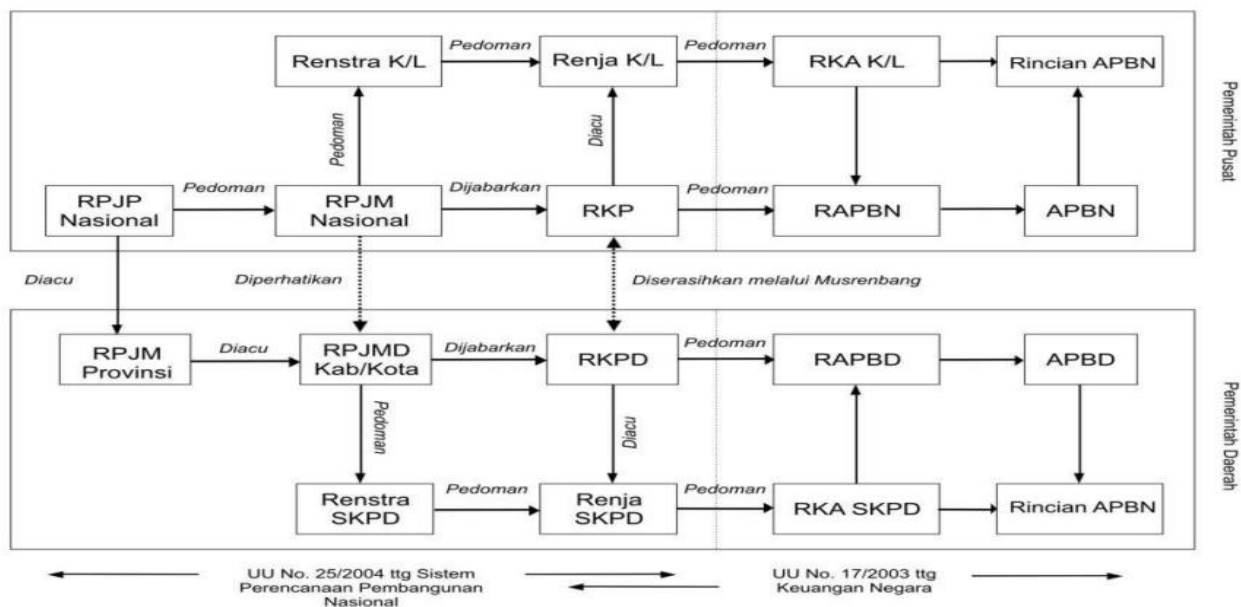


1.1.3 Amanat Regulasi

Renja Perangkaat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam Menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.2 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.1.4 Nilai Strategis Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

Rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2027 memiliki nilai strategis sebagai berikut :

- a. Meningkatkan realisasi investasi daerah, upaya peningkatan nilai investasi ini didukung dengan tiga program yang terdapat di DPMPTSP Kota Batam, seperti Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, sehingga dengan 3 (tiga) program ini dapat mempercepat laju investasi Kota Batam.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan. DPMPTSP menjadi salah satu SKPD di Kota Batam dalam pelayanan publik di bidang perizinan. Untuk mewujudkan itu terdapat tiga progam yang akan dijalankan yaitu Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- c. Menjaminn keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- d. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPTSP Kota Batam.
- e. Menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja perangkat daerah secara berkala.
- f. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui perencanaan yang parsipatif, transparan, akuntabel, efektif dan berorientasi pada hasil.
- g. Mendukung tercapainya visi, misi, tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Batam.

I.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dalam Menyusun Rencana Kerja Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
6. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam;
10. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 15 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1614);
14. Peraturan Wali Kota Batam nomor 75 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 29 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2027;

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2027, dan memberikan gambaran perencanaan program, kegiatan, lokasi dan Kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2027.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja PD adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) Tahun 2027.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2027 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Mengurai latar belakang penulisan (1.1), landasan hukum (1.2), maksud dan tujuan (1.3), sistematika penulisan (1.4)

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Mengurai tentang evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025 (2.1), evaluasi capaian SPM Tahun 2023-2025(2.2), rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 (2.3), telaah pokok pikiran DPRD (2.4), inovasi peningkatan pelayanan publik (2.5)

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Mengurai tentang Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (3.1), Telaah terhadap Kebijakan Nasional (3.2)

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah (4.1)

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan (5.1)

BAB VI PENUTUP

Mengurai terkait catatan penting (6.1), kaidah pelaksanaan (6.2), rencana tindak lanjut (6.3)

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025 (capaian tahun pertama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029)

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan dan hasil rencana program dan kegiatan.

Analisis kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam berisikan capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengann Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Indikator kinerja kunci Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam adalah sebagaimana table di bawah ini :

Tabel 2.1 (T-C. 29)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

NO	INDIKATOR	SPM	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota		√	5%	5%	5%	5%	73.57%	62.75%	5%	5%	
2	Realisasi total terhadap target investasi		√	100%	100%	100%	100%	118.2%	106.48%	100%	100%	

2.2 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam tidak termasuk perangkat daerah penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Pelayanan Minimal. Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam lebih difokuskan pada pelaksanaan urusan penunjang pemerintah di bidang peningkatan investasi daerah dan perizinan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Meskipun tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi indikator maupun target capaian SPM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal melalui upaya optimalisasi Peningkatan Nilai Investasi dan Pelayanan Perizinan. Peningkatan investasi dan pelayanan perizinan Pemerintah Kota Batam dalam pelayanan publik, termasuk pemenuhan pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah daerah.

2.3 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027 Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

A. Permasalahan Internal

1. Kekuatan (*Strengths*)

Isu strategis ini merupakan faktor pendukung dan pemicu dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja PD, dan faktor kekuatan yang dimiliki DPMPTSP Kota Batam adalah:

- Letak geografis yang strategis;
- Bangunan gedung yang cukup memadai;
- Adanya dukungan dan komitmen pimpinan untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal;
- Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) sebagai panduan dalam melaksanakan mekanisme pelayanan perizinan dan nonperizinan serta penanaman modal;
- Peraturan dan Perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan penanaman modal dan PTSP.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Isu strategis yang merupakan kelemahan yang menjadi kendala/penghambat dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja adalah sebagai berikut:

- Disiplin dan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masih rendah;
- Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi urusan penanaman modal dan sub urusan PTSP;
- Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan dalam mendukung kinerja pelayanan publik;

- d. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

B. Permasalahan Eksternal

1. Peluang (Opportunities)

Isu strategis ini merupakan isu strategis yang berasal dari luar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan dorongan/dukungan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas. Beberapa isu strategis yang menjadi faktor peluang (*opportunities*) DPMPTSP Kota Batam adalah :

- a. Pelaksanaan otonomi daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam meningkatkan pelayanan publik termasuk dunia usaha secara profesional;
- b. Penerapan pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi melalui aplikasi OSS RBA (*Risk Based Approach*);
- c. Minat pelaku usaha dalam berinvestasi di Kota Batam semakin tinggi;
- d. Iklim investasi di daerah yang kondusif;
- e. Merupakan daerah industri yang memiliki zona KEK dalam rangka memberikan banyak kemudahan dan insentif bagi investor yang menanam modalnya di zona KEK;
- f. Pertumbuhan UMKM di Kota Batam yang mampu menyerap tenaga kerja;
- g. Penyediaan data potensi dan peluang investasi yang merupakan modal pelaksanaan promosi secara optimal dan tepat sasaran;
- h. Tersedianya tempat dan *event* pameran skala nasional dalam rangka promosi peluang investasi Kota Batam.

2. Ancaman (Threats)

Isu strategis faktor eksternal yang menjadi Ancaman (*threats*) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kinerja OPD yang merupakan kendala maupun penghambat adalah sebagai berikut:

- a. Regulasi yang terus mengalami perubahan yang berdampak pada pelaksanaannya di lapangan;
- b. Rendahnya antusias masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap survey kepuasan masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan publik;
- c. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam mengurus perizinan dan nonperizinan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan usahanya;

2.3.2 Isu Strategis

Berdasarkan analisis kritis, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam antara lain :

Permasalahan secara umum investasi di Kota Batam yaitu kurangnya akses promosi penanaman modal, tetapi secara umum Investasi di Kota Batam mengalami peningkatan yang sangat signifikan dikarenakan banyak faktor pendukung dari Pemerintah Pusat baik dari sisi kebijakan maupun anggaran.

2.3.3 Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2025 sebagaimana dijelaskan pada uraian dibawah ini :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
 - a. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dari target fisik yaitu 1% mencapai 0,73%;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
 - a. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dari target fisik yaitu 100% mencapai 100%;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dari target fisik yaitu 93,35% mencapai 100%;
 - b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dari target fisik yaitu 5% mencapai 120, 57%;
 - c. Program Promosi Penanaman Modal, dari target fisik yaitu 1% mencapai 555%;
 - d. Program Pelayanan Penanaman Modal, dari target fisik yaitu 80% mencapai 104,28%;

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagaimana tersebut dalam table di bawah ini :

Tabel 2.2 (T-C. 30)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kota Batam

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1			2			3		4		5		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2																		
2	18																	
2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Indek Pelayanan Kesekretariatan PD	92,22 Nilai	-	90,29 Nilai	92,89 Nilai	100	90,32 Nilai	93.66 Nilai	100			
							Nilai SAKIP PD	78,54 Nilai		70,16 Nilai	70,16 Nilai	100	73,54 Nilai	0 Nilai	100			
2	18	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Peranngkat Daerah		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Sesuai Dengan Tahapan dan Waktu	100%	-	0%	0%	0	100%	100%	100			
2	18	01	2	01	01	Sub Kegiatann Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0	2 Dokumen	2 Dokumen	100		

2	1 8	0 1	2	02	0 2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	-	0 Laporan	0 Laporan	0	3 Laporan	3 Laporan	100
2	1 8	0 1	2	02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pegawai yang Menerima Layanan Administrasi Keuangan	100%	-	100%	100%	100	100%	100%	100
2	1 8	0 1	2	02	0 1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/Bulan	-	70 OB	796 OB		70 OB	70 OB	100
2	1 8	0 1	2	02	0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
2	1 8	0 1	2	02	0 3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0 Dokumen	0
2	1 8	0 1	2	05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	100%	-	100%	0%	0	100 %	100%	100
2	1 8	0 1	2	05	0 2	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	130 Paket	-	0 Paket	0 Paket	0	0 Paket	0 Paket	0
2	1 8	0 1	2	05	0 9	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	-	4 Orang	0 ASN	0	1 ASN	1 ASN	11,11
2	1 8	0 1	2	06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	-	100%	100%	100	100%	100	100

2	1 8	0 1	2	06	0 1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Paket	-	1 Paket	2 Paket	100	1 Paket	3 Paket	100
2	1 8	0 1	2	06	0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	-	3 Paket	4 Paket	100	4 Paket	8 Paket	100
2	1 8	0 1	2	06	0 4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 Paket	-	3 Paket	3 Paket	100	2 Paket	5 Paket	100
2	1 8	0 1	2	06	0 5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	-	2 Paket	2 Paket	100	2 Paket	4 Paket	100
2	1 8	0 1	2	06	0 6	Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	-	1 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
2	1 8	0 1	2	06	0 9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	0
2	1 8	0 1	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan	100%	-	100%	100%	100	100%	100%	100
2	1 8	0 1	2	07	0 2	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0 Unit	0
2	1 8	0 1	2	07	0 5	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100	2 Unit	3 Unit	100
2	1 8	0 1	2	07	0 6	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	143 Unit	-	47 Unit	37 Unit	100	8 Unit	45 Unit	100

2	1 8	0 1	2	07	1 1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	44 Unit	-	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0 Unit	0
2	1 8	0 1	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Sesuai Perencanaan	100%	-	100%	100%	100	100%	100%	100
2	1 8	0 1	2	08	0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
2	1 8	0 1	2	08	0 3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
2	1 8	0 1	2	08	0 4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100	0 Laporan	12 Laporan	100
2	1 8	0 1	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan Berfungsi dengan Baik	100%	-	100%	100%	100	100%	100	100
2	1 8	0 1	2	09	0 1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100
2	1 8	0 1	2	09	0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	-	5 Unit	5 Unit	100	5 Unit	5 Unit	100

2	1 8	0 1	2	09	0 6	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	99 Unit	-	97 Unit	97 Unit	100	72 Unit	72 Unit	100
2	1 8	0 1	2	09	0 9	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100
2	1 8	0 2		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			Jumlah Realisasi PMDN dan PMA	Rp.32.496.720.367.992	-	Rp.28.071.888.882.835	Rp.33.845.762.187.241	100	Rp.28.071.888.882.835	Rp.61.917.651.070.076	100
2	1 8	0 2	2	01		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	50%	-	0	0%	0	50%	0	0
2	1 8	0 2	2	01	0 1	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Pananaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Pananaman Modal	1 Dokumen	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	1 8	0 2	2	01	0 3	Sub Kegiatan Fasilitas Kemitraan yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di Daerah	4 Dokumen	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0 Dokumen	0
2	1 8	0 2	2	02		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase investor yang memanfaatkan peta potensi dan peluang usaha	75%	-	75%	75%	100	75%	75%	100

2	1 8	0 2	2	02	0 1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0 Dokumen	0
2	1 8	0 2	2	02	0 4	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi investasi Kabupaten/Kota	6 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	1 8	0 3		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	2%	-	1%	5.08%	5.08	1	5.08	100
2	1 8	0 3	2	01		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Persentase promosi penanaman modal yang dilaksanakan	100%	-	100%	90%	100	100	100	100
2	1 8	0 3	2	01	0 2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	20 Dokumen	-	7 Dokumen	9 Dokumen	100	2 Dokumen	11 Dokumen	100
2	1 8	0 3	2	01	0 3	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	5 Dokumen	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	1 8	0 4		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	80%	-	80%	95.94%	100	80%	95.94	100
2	1 8	0 4	2	01		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan sesuai waktu SOP	95%	-	97%	99.35%	100	97%	99.35	100

2	1 8	0 4	2	01	0 5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	1 8	0 4	2	01	0 6	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	32000 Pelaku Usaha	-	5000 Pelaku Usaha	13.542 Pelaku Usaha	13.542 Pelaku Usaha	5000 Pelaku Usaha	18.542 Pelaku Usaha	100
2	1 8	0 4	2	01	0 7	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1540 Pelaku Usaha	-	240 Pelaku Usaha	240 Pelaku Usaha	100	240 Pelaku Usaha	480 Pelaku Usaha	100
2	1 8	0 4	2	01	0 8	Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapatkan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	720 Kegiatan Usaha	-	120 Kegiatan Usaha	2.505 Kegiatan Usaha	100	40 Kegiatan Usaha	2.545 Kegiatan Usaaha	100
2	1 8	0 5		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			Persentase Proyek Investasi yang Diawasi	5%	-	1%	0.0073%	0.73%	5%	0.0073	0.73

2	1 8	0 5	2	01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Daerah		Tingkat pelaporan LKPM	50%	-	20%	65.04%	100	20%	65.04%	100
2	1 8	0 5	2	01	0 4	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	40 Kegiatan Usaha	-	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0
2	1 8	0 5	2	01	0 5	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1000 Pelaku Usaha	-	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100
2	1 8	0 5	2	01	0 6	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	411 Kegiatan Usaha	-	120 Kegiatan Usaha	6 Kegiatan Usaha	100	60 Kegiatan Usaha	66 Kegiatan Usaha	100
2	1 8	0 6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal dan PTSP oleh Perangkat Daerah	100%	-	100%	100%	100	100%	100%	100

2	1 8	0 6	2	01	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data dan informasi yang terintegrasi	100%	-	100%	100%	100	100%	100%	100
2	1 8	0 6	2	01	0 2	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	32000 Dokumen	-	3000 Dokumen	26.090 Dokumen	100	3000 Dokumen	29.090 Dokumen	100

2.3.4 Kondisi Lingkungan Dinamis

Selain mengacu pada dokumen perencanaan, penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027 juga mempertimbangkan berbagai perkembangan lingkungan strategis yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam, antara lain :

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, fungsi melekat DPMPTSP perumusan kebijakan, penyelenggaraan urusan penanaman modal, pemantauan dan pembinaan penanaman modal;
2. Iklim Investasi yang kondusif, diperlukan penguatan koordinasi lintas instansi di pemerintahan provinsi dan pemerintah pusat;
3. Letak strategis Batam menjadi destinasi *Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions* (MICE), merupakan salah satu program prioritas kepada daerah diharapkan menjadi salah satu potensi daerah yang dapat mengungkit peningkatan perekonomian daerah;
4. DPMPTSP sebagai *ex officio* Mal Pelayanan Publik (MPP), fungsi strategis DPMPTSP ini untuk mendekatkan pelayanan public yang mudah dan terintegrasi menjadi komitmen pemerintah Kota Batam.

6.1 Telaah Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran (Porkir) DPRD Kota Batam yang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tidak terdapat usulan maupun rekomendasi yang secara langsung menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam untuk ditindaklanjuti dalam bentuk program, kegiatan, maupun subkegiatan.

Hal tersebut disebabkan karena tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam berfokus kepada peningkatan investasi daerah dan pelayanan perizinan Kota Batam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, pokok-pokok pikiran DPRD pada umumnya lebih diarahkan pada usulan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan fisik, infrastruktur, serta urusan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

2.5 Inovasi Peningkatan Pelayanan Publik

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public di bidang perizinan daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam terus berupaya melakukan berbagai inovasi yang berorientasi pada kemudahan, kecepatan, transparansi, akuntabilitas dan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Inovasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, mendorong terciptanya iklim investasi yang berdaya saing, pelayanan perizinan yang mudah diakses dan cepat, sumber daya manusia yang berdaya saing dan kompeten.

Peningkatan pelayanan publik dilaksanakan melalui pengembangan layanan berbasis digital, perluasan akses pelayanan di masyarakat. Inovasi sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Server Penyimpanan Data

Melalui pengadaan server data diharapkan seluruh data administrasi baik di bidang perizinan, penanaman modal dan sekretariat dapat disimpan didalam satu server penyimpanan data

yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Sehingga dapat mempercepat akses data dan menata tata kelola kearsipan.

2. Digitalisasi Pelayanan Perizinan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dengan tujuan untuk menyediakan akses bagi pemohon perizinan. Pengembangan digitalisasi pelayanan perizinan sudah diakomodir dengan sistem aplikasi dari pusat yaitu OSS dan aplikasi pelayanan perizinan daerah EASY Pemerintah Kota Batam.

3. Inovasi B.E.T.U.A.H (Bergerak Efektif Temui Usaha Agar Hebat)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam mewujudkan pelayanan yang efektif, responsive, transparan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan inovasi B.E.T.U.A.H dilaksanakan melalui kegiatan antara lain :

- a. Pelayanan jemput bola ke kecamatan, kelurahan dan lokasi usaha;
- b. Sosialisasi dan edukasi perizinan berusaha;
- c. Pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB);
- d. Pendataan dan pembinaan pelaku usaha;
- e. Konsultasi perizinan dan nonperizinan;
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi;

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2025-2029. Adapun tujuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam adalah **“Terwujudnya Iklim Investasi yang Berdaya Saing”**.

Sedangkan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah;
2. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Pemerintahan;

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, target tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2027 mengacu pada Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Target Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2027

No.	Tujuan/Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD	Target
I	Terwujudnya Iklim Investasi yang Berdaya Saing	Persentase Peningkatan Investasi	5%
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Persentase Realisasi Investasi Terhadap Rencana Investasi	15%
2	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPSTSP Kota Batam	90,53%

3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional yang menjadi prioritas Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Secara umum, arah pembangunan pemerintah Presiden Prabowo berpijak pada **Visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”** yang dijabarkan ke dalam **8 Asta Cita** yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Asta Cita tersebut terdiri dari :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia;
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi;
6. Membangun dari desa dan dari bawah;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pemberantasan korupsi;

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, budaya, dan toleransi.

Sementara dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2027 mengangkat tema pembangunan **“Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berkarakter, Didukung Pelayanan Publik yang Bermutu”** dengan penjabaran ke dalam 3 (tiga) prioritas pembangunan diantaranya:

1. Pengembangan potensi ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
2. Pengembangan konektivitas antar wilayah dan pemertaan pembangunan infrastruktur serta ketahanan terhadap bencana;
3. Pengembangan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, dan perluasan pemanfaatan teknologi informasi, serta pelestarian budaya melayu.

Dalam mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dan provinsi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam memiliki peran strategis dalam meningkatkan nilai investasi daerah melalui optimalisasi pelayanan perizinan berusaha. Peran tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap agenda pembangunan nasional, khususnya dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, mempercepat transformasi digital pelayanan publik, memperkuat reformasi birokrasi, serta mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing. Optimalisasi nilai investasi dan pelayanan perizinan daerah juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan perekonomian Pemerintah Kota Batam untuk menjadi kota yang berdaya saing investasi baik dikanca nasional maupun internasional.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perizinan dan investasi, maka keluaran yang (*output*) kegiatan yang dihasilkan adalah tingkat investasi dan kualitas pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut tentunya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam secara spesifik berada pada kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam pada perencanaan tahun 2027 merupakan tahun ke-3 dalam Renstra Tahun 2025-2029. Adapun rencana kerja untuk mendukung tugas dan fungsi serta merealisasikan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam untuk tahun 2027 melaksanakan 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) subkegiatan, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 16.839.800.569. Adapun program dan kegiatan yang diusulkan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.
 - 3) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 4) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

- a. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitas Kemitraan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
 - 1) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.

3. Program Promosi Penanaman Modal.

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal.

- a. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik.
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko.
 - 4) Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

- a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya.
 - 2) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha.
 - 3) Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

- a. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Tahun 2027

2026-07-22

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Provinsi	Daerah					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			16.839.800.569								21.520.966.140			
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			16.839.800.569								21.520.966.140			
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			16.839.800.569								21.520.966.140			
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	92,22	90,35 Nilai	16.055.754.769							91,23	19.426.016.140	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
						Nilai SAKIP PD	78,54	74,45 Nilai								76,54		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	2.01		Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Sesuai dengan Tahapan dan Waktu		100% Persentase	8.000.000							100%	10.400.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	4.000.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	2	5.200.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Laporan	4.000.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Pengembangan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	3	5.200.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Menerima Layanan Administrasi Keuangan		100% Persentase	13.394.977.669							100%	14.958.161.140	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		73 Orang/bulan	13.355.697.669	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Pengembangan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	76	14.913.157.090	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	39.280.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	12	45.004.050	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya		100% Persentase	28.474.000								100%	170.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		9 Orang	28.474.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	9	170.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100% Persentase	378.184.600								100%	678.465.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2 Paket	5.000.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	2	7.465.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	114.965.600	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	4	185.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	33.746.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	2	30.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	39.280.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	2	4.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	1.800.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	12	2.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	183.393.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	12	450.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan		100% Persentase	500.041.100							100%	787.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit	0	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	- Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	0	0	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		3 Unit	65.356.400	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	- Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	3	39.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		8 Unit	86.244.700	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	- Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	8	500.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		11 Unit	348.440.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	- Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	11	248.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		100% Persentase	1.193.822.400								100%	1.710.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	1.099.320.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	12	1.600.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	94.502.400	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	12	110.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik		100% Persentase	552.255.000								100%	1.111.990.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	44.240.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	1	41.080.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5 Unit	177.750.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	5	240.910.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		96 Unit	137.445.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	96	230.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	192.820.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	1	600.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah realisasi PMDN dan PMA	32.496.720.367.992	29.475.483.326.977 Rupiah	262.110.000								30.949.257.493.326	280.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti		50% Persentase	3.450.000								50%	60.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah		3 Dokumen	3.450.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota dan Masyarakat	4	60.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Investor yang Memanfaatkan Peta Potensi dan Peluang Usaha		75% Persentase	258.660.000								75%	220.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	176.580.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota dan Masyarakat	0	0	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		1 Dokumen	82.080.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	1	220.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	2%	2% Persentase	395.341.800								2%	1.020.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan		100% Persentase	395.341.800								100%	1.020.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		2 Dokumen	377.311.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemeirntah Kota dan Masyarakat	2	630.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota		1 Dokumen	18.030.800	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota dan Masyarakat	1	390.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	80	80 Persentase	39.423.200								80	444.950.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan sesuai waktu SOP		97% Persentase	39.423.200								97%	444.950.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	3.000.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota dan Masyarakat	1	4.950.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		5500 Pelaku Usaha	12.423.200	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota dan Masyarakat	5500	80.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		260 Pelaku Usaha	12.000.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota dan Masyarakat	260	250.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha		60 Kegiatan Usaha	12.000.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota dan Masyarakat	80	110.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase proyek investasi yang diawasi	5	5 Persentase	57.170.800								5	260.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pelaporan LKPM		20% Persentase	57.170.800								20%	260.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		10 Kegiatan Usaha.	6.900.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota dan Masyarakat	10	10.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		200 Pelaku Usaha	43.370.800	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	200	220.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan, serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		60 Kegiatan Usaha	6.900.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota dan Masyarakat	75	30.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal dan PTSP oleh Perangkat Daerah	100%	100% Persentase	30.000.000								100%	90.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi yang Terintegrasi		100% Persentase	30.000.000								100%	90.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		5500 Dokumen	30.000.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota dan Masyarakat	5500	90.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					TOTAL:					16.839.800.569		21.520.966.140							

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan kontribusinya terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sekaligus menjadi dasar dalam pelaksanaan evaluasi, pengendalian, dan penyempurnaan kebijakan serta program pembangunan di bidang pengelolaan pendapatan daerah.

Pencapaian IKU mencerminkan tingkat keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Capaian tersebut diperoleh melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang diarahkan pada optimalisasi meningkatkan realisasi investasi daerah dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan pemerintahan.

Selain mengukur kinerja perangkat daerah, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam juga berkontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan peningkatan investasi di kabupaten/kotaa dann realisasi total terhadap target investasi. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui upaya peningkatan sistem pelayanan perizinan, penyediaan peta potensi daerah, bimbingan teknis kepada pelaku usaha, serta pengembangan inovasi pelayanan publik.

Hasil pengukuran kinerja IKU dan kontribusi terhadap IKK menjadi bahan evaluasi dalam menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam. Evaluasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan, penyusunan strategi, serta peningkatan kualitas perencanaan pada periode berikutnya guna mewujudkan investasi dan pelayanan perizinan yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Berikut capaian kinerja IKU dan IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam tahun 2025 beserta target tahun 2027.

Tabel 5.1

Kinerja IKU dan IKK Tahun 2025 dan Target Tahun 2027

Indikator Kinerja Kunci			
Indikator	Satuan	Kinerja 2025	Target 2027
Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persentase	73.57	5%
Realisasi total terhadap target investasi	Persentase	118.2	100%
Indikator Kinerja Utama			
Persentase peningkatan investasi	Persentase	5.87%	5%
Persentase realisasi investasi terhadap rencana investasi	Persentase	39.66%	15%
Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	96.47	90.53

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam pada Tahun 2027 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Batam yang menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2027 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparaturnya pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

6.1 Catatan Penting

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam tahun 2027 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027 dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2025-2029 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2027, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arahan kebijakan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2026 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2027 terdiri atas 6 program, 13 kegiatan dan 32 subkegiatan. Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dalam Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti : kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunann daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dasar Perubahan RKPD Tahun 2027, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2027.

6.2 Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2025-2029, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan

prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan Tahun 2027 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi, RKPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan Renstra Perangkat Daerah).
2. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN.

6.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2027 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) daerah di Renja tahun 2027;
2. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana yakni kendaraan dinas operasional, komputer, printer, scanner dan lemari arsip;
3. Membentuk Tim Zona Integritas DPMPTSP Kota Batam dan menyusun rencana kerja pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
4. Mengikuti bimbingan teknis mengenai system perizinan berusaha berbasis risiko yang diselenggarakan oleh BKPM;

Demikian Rencana Kerja DPMPTSP Kota Batam Tahun 2027 yang telah kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja DPMPTSP Kota Batam dalam pelayanan Perizinan dan Investasi di Kota Batam

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD